



Strategi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat

(Studi Objek Wisata Bukit Bikium, Desa Tunua)

Barbalina N.K.S Oematan^{1*}, Umbu T.W. Pariangu², Aspri Budi Oktavianto³,
Syukur M.A. Djaha⁴

¹⁻⁴Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email: oematanbarbalina@gmail.com¹, umbu.umbupariangu.pariangu25@gmail.com²,
aspribudi@staf.undana.ac.id³, syukurdjaha@staf.undana.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi : oematanbarbalina@gmail.com

Abstract : *This study aims to analyze the strategy of the Village Government in managing Bukit Bikium as a community-based tourism destination in Tunua Village, Mollo Utara District, South Central Timor Regency. The research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants include village government officials, community members, and tourism managers involved in the management of Bukit Bikium. The analysis is conducted using Henry Mintzberg's 5P strategy framework and SWOT analysis to identify internal and external factors influencing tourism management. The findings indicate that the Village Government has implemented adaptive and participatory strategies by involving local communities through farmer groups, initiating basic infrastructure development, and fostering collaboration with relevant government agencies. However, the management of Bukit Bikium faces several challenges, particularly limited legal authority, inadequate infrastructure, and weak promotion strategies. Despite these constraints, Bukit Bikium demonstrates strong potential to be developed as a community-based tourism destination that supports local economic development. The study concludes that strengthening institutional capacity, improving coordination with forestry authorities, and enhancing community participation are essential to ensure sustainable tourism management. These findings provide practical insights for village governments in developing tourism strategies based on local potential and community empowerment.*

Keywords: *Bukit Bikium; Community-Based Tourism; SWOT Analysis; Tourism Management; Village Government Strategy.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa dalam pengelolaan objek wisata Bukit Bikium sebagai wisata berbasis masyarakat di Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparatatur Pemerintah Desa, masyarakat, serta pihak pengelola wisata yang terlibat dalam pengelolaan Bukit Bikium. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka strategi 5P menurut Henry Mintzberg dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengelolaan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tunua telah menerapkan strategi yang bersifat adaptif dan partisipatif melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata, pembentukan kelompok pengelola, serta inisiatif pembangunan infrastruktur pendukung. Namun demikian, pengelolaan Bukit Bikium masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan kewenangan legal, minimnya fasilitas penunjang, dan belum optimalnya strategi promosi. Meskipun demikian, Bukit Bikium memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata berbasis masyarakat yang mampu mendorong peningkatan ekonomi lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi dengan pihak kehutanan, serta optimalisasi partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Analisis SWOT; Bukit Bikium; Pariwisata Berbasis Masyarakat; Pengelolaan Pariwisata; Strategi Pemerintah Desa.

1. LATAR BELAKANG

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah karena menjadi unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat dan memiliki kewenangan untuk mengelola potensi lokal berdasarkan prinsip otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konteks ini, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pembangunan yang adaptif serta partisipatif.

Salah satu sektor yang dinilai mampu mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan adalah sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ekonomi desa dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga berperan dalam memperkuat identitas sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata desa menuntut keterlibatan aktif masyarakat sebagai aktor utama agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT) menjadi relevan dalam pengembangan pariwisata desa karena menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan destinasi wisata. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai prasyarat utama keberlanjutan destinasi wisata. Dengan demikian, keberhasilan CBT sangat bergantung pada peran strategis pemerintah desa dalam menciptakan kerangka kelembagaan dan kebijakan yang mendukung.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi wisata alam yang besar dan terus berkembang. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), khususnya Kecamatan Mollo Utara, memiliki sejumlah destinasi wisata alam yang mulai dikembangkan, salah satunya adalah Bukit Bikium yang terletak di Desa Tunua. Bukit Bikium dikenal memiliki panorama alam pegunungan yang khas dan berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat.

Pengelolaan objek wisata Bukit Bikium masih menghadapi berbagai keterbatasan. Pengelolaan wisata cenderung dilakukan secara informal oleh kelompok masyarakat dan belum didukung oleh struktur kelembagaan desa yang kuat. Keterbatasan legalitas kawasan, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya strategi promosi menjadi kendala utama dalam pengembangan wisata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wisata yang dimiliki dengan efektivitas strategi pengelolaan yang diterapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa Tunua dalam pengelolaan objek wisata Bukit Bikium sebagai wisata berbasis masyarakat. Analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan wisata desa, serta memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan pariwisata desa yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Desentralisasi dan Peran Pemerintah Desa

Desentralisasi dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal (Riyadi, 2020). Dalam konteks Indonesia, desentralisasi diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi ruang bagi desa untuk berperan aktif dalam pembangunan, termasuk sektor pariwisata. Desentralisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan (Sutiyo & Maharjan, 2017). Oleh karena itu, desa memiliki posisi strategis sebagai aktor utama dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas.

***Good Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata Desa**

Konsep *good governance* menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan responsivitas. Menurut United Nations Development Programme (1997; 2019), prinsip-prinsip tersebut penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks pariwisata desa, penerapan *good governance* diperlukan agar pengelolaan destinasi tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial serta mampu memberdayakan masyarakat lokal.

Konsep Manajemen dan Pengelolaan

Manajemen dipahami sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Griffin, 2020). Dalam pengelolaan pariwisata desa, fungsi-fungsi manajemen ini digunakan untuk merancang program pengembangan wisata, mengatur peran aktor yang terlibat, melaksanakan kegiatan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi. Pengelolaan yang baik harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan agar tercapai keberlanjutan jangka panjang (Sutopo & Sari, 2020).

Teori Strategi 5P oleh Henry Mintzberg

Teori strategi 5P yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg (1994) memandang strategi melalui lima perspektif, yaitu *plan*, *ploy*, *pattern*, *position*, dan *perspective*. Strategi tidak hanya dipahami sebagai perencanaan formal, tetapi juga sebagai pola tindakan yang berkembang dari praktik dan pengalaman di lapangan. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis strategi pemerintah desa dalam mengelola objek wisata, karena mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal serta dinamika organisasi desa.

Teori Pengelolaan Pariwisata oleh Clare Gunn

Teori pengelolaan pariwisata yang dikemukakan oleh Clare Gunn (1994) menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan terpadu dalam perencanaan pariwisata. Gunn mengidentifikasi enam komponen utama pariwisata, yaitu atraksi, fasilitas, aksesibilitas, informasi, promosi, dan pelayanan. Selain itu, Gunn menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam seluruh tahapan pengelolaan pariwisata guna menciptakan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Konsep Pariwisata, Desa, dan Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata didefinisikan sebagai aktivitas perjalanan sementara untuk tujuan rekreasi, edukasi, atau kepentingan lain yang melibatkan interaksi antara wisatawan, masyarakat, dan lingkungan destinasi (UNWTO, 1995; Mathieson & Wall, 1982). Desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan lokal. Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, Jarkko Saarinen (2006) menekankan integrasi dimensi ekologi, sosial-budaya, dan ekonomi agar manfaat pariwisata dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan mendatang.

Community-Based Tourism (CBT)

Community-Based Tourism (CBT) merupakan pendekatan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan pariwisata. Menurut Suansri (2019), prinsip utama CBT meliputi pemberdayaan masyarakat, pemerataan manfaat ekonomi, serta pelestarian budaya dan lingkungan. CBT relevan untuk pengembangan desa wisata karena mendorong kemandirian masyarakat dan memperkuat keberlanjutan destinasi.

Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan sebagai alat strategis untuk mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam pengelolaan pariwisata desa. Menurut Rangkuti (2019) dan David (2017), SWOT membantu perumusan strategi yang adaptif dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan

kelemahan dan ancaman. Dalam konteks penelitian ini, SWOT digunakan untuk menilai kesiapan dan posisi strategis desa dalam mengelola objek wisata secara berkelanjutan dan berbasis komunitas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi Pemerintah Desa Tunua dalam pengelolaan objek wisata alam Bukit Bikium. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara kontekstual berdasarkan kondisi nyata di lapangan, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian kualitatif menekankan pemaknaan data dan analisis induktif dibandingkan generalisasi (Tampubolon, 2023). Penelitian dilaksanakan di Objek Wisata Alam Bukit Bikium, Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), yang memiliki potensi wisata alam namun masih menghadapi berbagai tantangan pengelolaan, seperti keterbatasan sumber daya, fasilitas, dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Fokus penelitian diarahkan pada strategi Pemerintah Desa Tunua dalam pengelolaan objek wisata Bukit Bikium, yang mencakup perencanaan strategi, implementasi inisiatif lapangan, koordinasi dan kemitraan lintas lembaga, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas (CBT), serta hambatan dan tantangan strategis yang dihadapi. Analisis strategi perencanaan mengacu pada teori strategi 5P yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap aparatur desa, pengelola wisata, masyarakat lokal, dan wisatawan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan, serta literatur yang relevan (Sugiyono, 2019).

Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling, didukung oleh accidental sampling dan snowball sampling, dengan kriteria informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan wisata Bukit Bikium. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan hingga diperoleh temuan yang mendalam dan konsisten. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi, meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dengan membandingkan data dari berbagai informan serta metode pengumpulan data untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian (Patton,

1999).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Bukit Bikium

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tunua telah menempatkan Bukit Bikium sebagai potensi unggulan desa untuk mendorong ekonomi lokal. Aktivitas wisata telah berjalan dengan meningkatnya kunjungan dan keterlibatan masyarakat, namun pengelolaan belum dilembagakan secara formal. Tidak ditemukan regulasi desa, struktur pengelola resmi, maupun sistem tiket yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Kondisi ini disebabkan oleh status kawasan Bukit Bikium yang masih berada dalam wilayah kehutanan, sehingga kewenangan desa masih terbatas.

Kepala Desa Tunua menegaskan bahwa Bukit Bikium memiliki nilai strategis bagi desa, namun pelaksanaan perencanaan masih menunggu legalitas dari Kementerian Kehutanan. Hal ini diperkuat oleh keterangan pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang menyatakan bahwa kawasan tersebut berada dalam Hutan Mutis–Timau dan sedang diproses melalui skema Perhutanan Sosial yang melibatkan Gapoktan Tolan Fanu lintas desa.

Analisis Strategi Berdasarkan Pendekatan 5P

Strategi Pemerintah Desa Tunua dapat dipahami melalui pendekatan 5P menurut Henry Mintzberg, yaitu:

a. *Plan* (Perencanaan)

Desa memiliki visi menjadikan Bukit Bikium sebagai aset wisata desa, tercermin dari pembentukan Gapoktan dan penggunaan Dana Desa untuk sarana awal. Namun, perencanaan masih bersifat jangka panjang dan bergantung pada kepastian legal kawasan.

b. *Play* (Siasat)

Pemerintah desa menerapkan strategi adaptif melalui kerja sama dengan Dinas Kehutanan dan mobilisasi masyarakat, seperti kerja bakti rutin dan pemeliharaan fasilitas secara swadaya.

c. *Pattern* (Pola)

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, serta aktivitas ekonomi kecil telah menjadi pola berulang berbasis gotong royong, menunjukkan internalisasi strategi dalam praktik sosial.

d. *Position* (Posisi)

Bukit Bikium menjadi ikon wisata alam Desa Tunua dengan akses relatif mudah, namun posisi kelembagaan desa masih lemah karena keterbatasan kewenangan formal.

e. *Perspective* (Perspektif)

Pemerintah desa dan masyarakat memandang Bukit Bikium sebagai simbol identitas dan kebanggaan desa, dengan orientasi pengembangan wisata alam dan budaya berbasis komunitas.

Implementasi Strategi dan Inisiatif Desa

Implementasi strategi dilakukan melalui pendekatan berbasis masyarakat, ditandai dengan keterlibatan warga dalam pengelolaan parkir, kebersihan, keamanan, serta penjualan hasil kebun. Pemerintah desa memberi ruang partisipasi dan memfasilitasi koordinasi dengan pihak kehutanan. Keberadaan Gapoktan Tolan Fanu berfungsi sebagai kelembagaan awal yang menghubungkan masyarakat, desa, dan kehutanan, meskipun belum didukung tata kelola yang sepenuhnya terstruktur.

Koordinasi dan Kemitraan Antar Pihak

Pengelolaan Bukit Bikium melibatkan Pemerintah Desa Tunua, Dinas Kehutanan, dan Gapoktan Tolan Fanu. Pola hubungan menunjukkan pembagian peran kolaboratif: Dinas Kehutanan sebagai pemegang kewenangan legal, Gapoktan sebagai pelaksana lapangan, dan pemerintah desa sebagai fasilitator serta penghubung kepentingan lokal. Ketiadaan regulasi desa menegaskan bahwa peran pemerintah desa masih bersifat pendampingan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Desa Tunua mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan langsung dalam aktivitas wisata dan pembentukan kelembagaan lokal. Masyarakat memperoleh manfaat ekonomi tambahan dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap objek wisata. Pola ini sejalan dengan prinsip *community-based tourism*, di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam pengelolaan wisata.

Tantangan dan Hambatan Strategis

Penelitian mengidentifikasi sejumlah hambatan utama, yaitu: 1) Keterbatasan kewenangan desa akibat status kawasan kehutanan, 2) Belum adanya regulasi dan kelembagaan formal desa, 3) Keterbatasan infrastruktur pendukung wisata, dan 4) Ketergantungan pada izin serta kebijakan pihak kehutanan.

Hambatan tersebut menyebabkan pengelolaan wisata berjalan secara sederhana dan belum berkembang sebagai unit usaha desa yang terstruktur.

Analisis SWOT dan Implikasi Strategis

Analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan utama Bukit Bikium terletak pada potensi alam, partisipasi masyarakat, dan dukungan pemerintah desa, sementara kelemahannya mencakup aspek legalitas, infrastruktur, promosi, dan SOP pengelolaan. Peluang berasal dari

dukungan program desa wisata dan perkembangan promosi digital, sedangkan ancaman meliputi ketergantungan kebijakan kehutanan, risiko lingkungan, dan persaingan destinasi lain.

Berdasarkan matriks SWOT, strategi yang direkomendasikan mencakup pengembangan paket wisata alam dan budaya, penguatan promosi digital, peningkatan peran masyarakat dan Gapoktan, penyusunan SOP dan regulasi desa, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa Tunua bersifat adaptif, kolaboratif, dan berbasis masyarakat. Meskipun menghadapi keterbatasan struktural, desa mampu menggerakkan partisipasi sosial dan memanfaatkan potensi lokal sebagai modal pembangunan. Strategi ini menempatkan pengelolaan wisata tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan desa yang mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Pemerintah Desa Tunua dalam pengelolaan Objek Wisata Bukit Bikium telah menunjukkan arah pengembangan yang jelas, namun pelaksanaannya masih dibatasi oleh keterbatasan kewenangan dan sumber daya. Pemerintah desa telah menetapkan Bukit Bikium sebagai potensi unggulan melalui perencanaan bertahap, pemanfaatan Dana Desa, pembentukan Gapoktan, dan koordinasi dengan pihak kehutanan, meskipun status kawasan belum sepenuhnya berada di bawah kewenangan desa. Implementasi pengelolaan berjalan melalui keterlibatan aktif masyarakat dengan pola berbasis komunitas, walaupun belum terstruktur secara formal. Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan peran Gapoktan memungkinkan aktivitas wisata tetap berlangsung, sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal. Berdasarkan analisis SWOT, pengelolaan Bukit Bikium memiliki peluang eksternal yang besar, namun masih menghadapi kelemahan internal pada aspek legalitas, infrastruktur, dan sistem pengelolaan, sehingga diperlukan strategi yang memanfaatkan peluang tersebut untuk memperkuat kapasitas internal desa.

Saran

Pemerintah Desa Tunua perlu memperkuat tata kelola pengelolaan wisata melalui penyusunan regulasi desa dan standar operasional sebagai pedoman sementara. Pemerintah daerah dan Dinas Kehutanan diharapkan mempercepat proses legalitas serta memberikan pendampingan teknis agar desa memiliki kepastian kewenangan dalam mengelola Bukit Bikium. Masyarakat dan Gapoktan Tolan Fanu perlu terus meningkatkan peran dalam

pelestarian lingkungan, pelayanan wisata, dan pengembangan produk lokal. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji dampak ekonomi dan sosial pengembangan Bukit Bikium terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tunua.

DAFTAR REFERENSI

- Adolph, R. (2016). *Konsep dan kebijakan strategis di Kementerian Agama*. Free Press.
- Agustin, A. (2018). *Strategi pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata (Studi pada Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)* [Skripsi, Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162406/>
- Ahmadi, R. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Bintarto, & Surastopo. (1987). *Metode analisis geografi*. LP3ES.
- Bintarto. (1983). *Pengantar geografi sosial*. Fakultas Geografi UGM.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif*. Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Di, D., Bendosari, D., & Pujon, K. (2019). Hutan pinus untuk meningkatkan pendapatan asli. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 9, 161–167. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1509>
- Duadji, N., Tresiana, N., & Faedlulloh, D. (2019). *Ilmu administrasi publik*.
- Dwi, R. S. (2020). *Kesesuaian pengembangan kawasan Air Terjun Anglo dalam perspektif pariwisata berkelanjutan* [Skripsi]. https://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2012180001/22116161_20_144742.pdf
- Elim, Y. V., & Mba, D. A. (2021). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di kawasan pariwisata prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2019. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 9(1), 23–32. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2021.v09.i01.p03>
- Gunn, C. A. (1994). *Tourism planning: Basics, concepts, cases*. Taylor & Francis.
- Hardiyanti, M., & Diamantina, A. (2022). Urgensi otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 334–352. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44410>
- Ilham Zitri, Y., Lestanata, Y., & Pratama, I. N. (2020). Strategi pemerintah desa dalam pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat (Community-based tourism). *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 3(2), 99–113. <https://doi.org/10.24905/igj.v3i2.1531>
- Ira Sandika, S., Aini, S., Simbolon, Y. K., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis sistem pemerintah desa di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 212–223. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89>
- Joka, U., Maulana, A. S., Mambur, Y. P. V., Manek, S. S., & Bukifan, M. (2021). Pemberdayaan dan optimalisasi potensi wisata alam bagi pengelola wisata di Desa Ajaobaki berbasis promosi media sosial. *Prosiding Seminar Nasional Ke-4 Hasil-Hasil Pengabdian*, 1–8. <https://ejurnal.politanikoe.ac.id/index.php/psnb/article/view/84>
- Koentjaraningrat. (1993). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.

- Liani, Y., Takari, D., & Ompusunggu, D. P. (2024). Analisis efektivitas kebijakan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Gunung Mas tahun 2022. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11), 4810–4825. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i11.1760>
- Manteiro, M. C. B. (2023). Pengembangan pariwisata (Community-based tourism) sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 8(2), 190–203.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mintzberg, H. (1994). *The rise and fall of strategic planning*. Free Press.
- Mukhirto, M., & Fathoni, T. (2022). Strategi pemerintah desa Gandukepuh terhadap pengembangan objek wisata religi. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 4(1), 23–35. <https://doi.org/10.37680/jcd.v4i1.1264>
- Nursetiawan, I., & Supriyanto, B. (2023). Kolaborasi pemerintah dan masyarakat Desa Sukamaju dalam pengembangan wisata Bukit Sampalan Asri berbasis community-based tourism. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 10, 93–107.
- Paisal, P., Suwandi, S., & Mirawati, I. (2022). Komunikasi pariwisata dalam pengembangan destinasi wisata di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 1349–1358. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9269>
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2013). *Strategic management: Planning for domestic & global competition* (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Pendit, S. N. (1994). *Ilmu pariwisata: Sebuah pengantar perdana*. PT Pradnya Paramita.
- Priatin, D. O. E., & Humairoh. (2023). Kupas tuntas teori Wheelen dan Hunger dengan metode kualitatif. *Jurnal Manajemen Strategis*, 1(1), 17–25.
- Raju, K. (2024). A study on the impact of Mintzberg's 5Ps on MSMEs growth in Telangana State with reference to self-reliance. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(5), 3943–3949. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.3552>
- Rangkuti, F. (2020). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Satriawan, R., Zulharman, Z., & Noeryoko, M. (2024). Pengelolaan objek wisata olahraga berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(3), 2637–2648.
- Sentanu, I. G. E. P. S., & Mahadiansar, M. (2020). Memperkuat peran pemerintah daerah: Mengelola pariwisata lokal yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.31629/juan.v8i1.1879>
- Sholihah, N. (2018). *Strategi pengelolaan desa wisata dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (Studi pada Dinas Pariwisata Kota Batu)* [Skripsi, Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/162434/>
- St. Soeraya, B., & Jabbar, A. (2020). Strategi pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata sebagai desa wisata alam di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.25299/wedana.v6i2.7453>

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarni, S., Patria, R., & Pujiati, H. R. (2020). Implementasi pentahelix dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 1(2), 28–39. <https://doi.org/10.22146/jpmmpi.v1i2.71359>
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran pemerintah desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata (Studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 10(2), 365–380. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380>
- Tohopi, R., Ngabito, F. M., & Mukdin, N. B. (2025). Implementasi community-based tourism sebagai strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 11(1), 159–171. <https://doi.org/10.23887/jiis.v11i1.94077>
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP Publications.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic management and business policy: Toward global sustainability* (13th ed.). Pearson Education.